



Kendala-Kendala Elit Agama, Pemerintah dan Adat dalam Penertiban Orgen Tunggal pada Masyarakat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman

Siti Rahmi, Susi Fitria Dewi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

FIS Universitas Negeri Padang

E-mail: rahmihasibuan331@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala elit agama, pemerintah dan adat dalam penertiban orgen tunggal pada masyarakat Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit agama, pemerintah dan adat memiliki kendala-kendala dalam penertiban orgen tunggal pada masyarakat Nagari Kasang. Kendala-kendala tersebut yaitu pemahaman agama para pelanggar yang lemah, jumlah Korong yang cukup banyak di Nagari Kasang, pemilik acara dan tamu undangan tidak menghiraukan arahan Wali Nagari, tumpang tindih kewenangan penertiban orgen tunggal, serta wali nagari yang tidak tegas dalam penertiban orgen tunggal. Sedangkan kendala dari elit adat yaitu luntarnya adat istiadat masyarakat pelanggar, pemuka adat jenuh mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan orgen tunggal, dan kesulitan-kesulitan lain yang timbul.

Kata Kunci: elit pemerintah, orgen tunggal, Nagari Kasang

ABSTRACT

This study aims to determine the constraints of religious, government and customary elites in controlling single organs in the Nagari Kasang community, Padang Pariaman Regency. This study uses a qualitative-descriptive type of research. The results showed that religious, government and customary elites had problems in controlling single organs in the Nagari Kasang community. These obstacles are the weak understanding of the religion of the violators, the large number of Korong in Nagari Kasang, event owners and invited guests who ignore the instructions of the Nagari Wali, overlapping authority to control single organs, and Nagari guardians who are not firm in controlling single organs. Meanwhile, the constraints of the traditional elite are the fading of the customs of the violators, the saturated traditional leaders reminding the community not to use a single organ, and other difficulties that arise.

Keywords: local government, local music, Nagari Kasang



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Pertunjukkan musik bisa dinikmati dalam berbagai jenis *genre* musiknya dan disajikan dengan alat musik pendukung yang ada (Iswanto, 2018). Salah satu bentuk



pertunjukkan musik yang ada pada masyarakat yaitu organ tunggal. Organ tunggal yaitu pertunjukkan musik menggunakan alat musik keyboard yang nadanya dihasilkan dari dawai elektronik. Hiburan organ tunggal bisa kita jumpai pada perhelatan seperti pernikahan, khitanan, acara pemuda dan sebagainya. Hiburan organ tunggal memiliki dampak baik dan dampak buruk. Namun cenderung memberikan dampak buruk bagi orang yang mengadakan dan tamu pada hiburan tersebut.

Pelanggaran organ tunggal di Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2016 terdapat 194 kasus pelanggaran pertunjukan organ tunggal. Jumlah ini berkurang menjadi 179 kasus di tahun 2017 dan 98 kasus di tahun 2018 (Satpol PP Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2018). Meskipun setiap tahun telah berkurang akan tetapi di beberapa tempat jumlah pelanggaran organ tunggal justru tidak berkurang secara signifikan, salah satunya di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman.

Upaya dalam mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Organ Tunggal. Meskipun aturan telah ditetapkan dan diberlakukan. Namun, sebagian masyarakat tidak mengindahkan Peraturan tersebut. Oleh karena itu, agar terlaksananya peraturan mengenai penertiban organ tunggal harus ada peran serta dari elit agama, pemerintah dan adat. Sinergi elit agama, pemerintah dan adat pada masyarakat tergabung dalam suatu lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada nagari Kasang, perlu adanya upaya kontrol yang dilakukan oleh KAN. KAN berfungsi untuk menyelesaikan masalah mengenai pelanggaran adat dan pelanggaran syara' yang ada dalam masyarakat. Maka penelitian ini akan lebih berfokus pada sinergi elit agama, pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam upaya penertiban organ tunggal tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penertiban organ tunggal. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan penelitian ini terdiri dari Wali Nagari Kasang, Kepala Seksi Lidik Sidik Satpol PP Kabupaten Padang Pariaman, Niniak Mamak Nagari Kasang, Bundo Kanduang, alim ulama, Imam, Wali Korong, dan Masyarakat Nagari Kasang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data melalui triangulasi sumber. Sumber dan data yang diperoleh yakni melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan lalu di verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maraknya organ tunggal di Nagari Kasang yang melanggar aturan dan sangat bertentangan dengan norma yang berlaku didalam masyarakat telah mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Maka dari itu perlu penertiban organ tunggal yang melibatkan Sinergi agama, pemerintah daerah dan adat. Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menemukan kendala yang dihadapi perangkat daerah tadi dalam penertiban organ tunggal. Beberapa kendala yang muncul antara lain sebagai berikut:

Elit Agama

Lemahnya pemahaman agama sebagian masyarakat di Nagari Kasang menjadi Kendala pertama dalam upaya penertiban ini. Hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang mengadakan organ tunggal pada perhelatan yang diadakan. Pada organ tunggal

tersebut menggunakan musik yang keras, menggunakan artis (biduan wanita) untuk disawer dan lainnya.

Sejatinya, dalam memperoleh pemahaman agama dalam diri seseorang dapat dilakukan dengan cara Pendidikan. Pendekatan pembelajaran dapat dilihat dari 3 (tiga) aliran, yaitu (1) aliran nativisme adalah aliran yang menyatakan bahwa manusia memiliki potensi sejak lahir untuk mau belajar; (2) aliran empirisme, menyatakan bahwa perilaku belajar manusia tergantung pada lingkungannya; (3) aliran konvergen mengemukakan bahwa perilaku belajar seseorang dikarenakan adanya perpaduan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan (Walgito, 2004).

Elit Pemerintah

Banyaknya Korong di Nagari Kasang menjadi persoalan dalam penertiban orgen tunggal. Dimana Nagari Kasang memiliki 10 (*sepuluh*) Korong. Jumlah yang cukup besar membuat upaya penertiban tidak menjangkau seluruh sasaran. Dalam hal ini Wali Nagari perlu kerjasama dengan dengan Wali Korong sebagai perpanjangan tangan dalam pemerintahannya. Kendala lain yang muncul adalah Pemilik acara dan tamu undangan pada acara orgen tunggal tidak menghiraukan arahan Wali Nagari. Seperti yang diketahui bahwa setiap orang yang akan menikah terlebih dahulu meminta surat NA (Numpang Nikah) di Kantor Wali Nagari sebagai suatu persyaratan untuk menikah. Pada kesempatan tersebut pihak Wali Nagari selalu berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakatnya untuk tidak mengadakan orgen tunggal pada malam hari. Namun, hal tersebut tidak diindahkan oleh sebagian pihak pemilik acara. Hal yang menyebabkan sebagian masyarakat tidak menghiraukan Wali Nagari untuk tidak mengadakan orgen tunggal pada malam hari dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan sanksi yang masih lemah. Menurut Soekanto (1982), kesadaran masyarakat terhadap aturan yaitu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang terhadap nilai-nilai yang ada. Pada penertiban orgen tunggal di Nagari Kasang, terdapat masyarakat yang tidak memahami aturan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Kendala selanjutnya yang muncul adalah tumpang tindih kewenangan. Demi terlaksananya suatu kebijakan secara optimal, maka harus ada alur komando yang jelas. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Daerah, harus ada ketegasan dari pelaksanaannya yaitu peranan dari Satpol PP. Satpol-PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan tersebut tak terkecuali peraturan mengenai penertiban orgen tunggal. Alih-alih menjalankan tugasnya, Satpol-PP justru mendelegasikan kepada pemerintah nagari dalam mengatasi persoalan orgen tunggal. J.G. Brouwer dan A.E. Schilder (dalam Andi 2016) mengatakan bahwa delegasi kewenangan adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (pemberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Secara teori delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintah kepada organ lainnya. Dalam proses delegasi kewenangan oleh pemerintah sering terjadinya tumpang tindih kewenangan. Dampak dari tumpang tindih tersebut adalah konflik kewenangan.

Penyebab lain yang menjadi faktor penghambat terjalannya penertiban orgen tunggal di Nagari Kasang yaitu dikarenakan Wali Nagari yang tidak tegas. Sebagai Wali Nagari memiliki tugas yaitu membina kehidupan masyarakat. Namun, Wali nagari Kasang kurang tegas dalam mengatasi dampak buruk hiburan orgen tunggal pada malam hari



terhadap masyarakat nagari Kasang. Hal tersebut diketahui dari belum adanya Peraturan Nagari mengenai hiburan organ tunggal.

Pasolong (2013) mengatakan pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Kepemimpinan pada dasarnya harus diwujudkan dengan kemampuan mengeliminasi, mengurangi, dan jika mungkin meniadakan kegiatan individual.

Elit Adat

Permasalahan yang muncul dari aspek adat istiadat adalah lunturnya implementasi adat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini diketahui dari adanya perubahan pada pelaksanaan pesta pernikahan yang dilakukan sebagian masyarakat Nagari Kasang. Jika dahulu pada pesta pernikahan ditampilkan kesenian tradisional Minangkabau seperti basaluang, barabab, dan kesenian tradisional lainnya. Berbeda dengan saat sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi masyarakat Nagari Kasang cenderung menggunakan jasa organ tunggal pada pesta yang akan digelar. Ini merupakan salah satu perubahan sosial di masyarakat. Hans Garth dan C. Wright (dalam Setiadi 2011) menyatakan bahwa perubahan sosial adalah segala hal yang terjadi seperti kemunculan, perkembangan, ataupun kemunduran dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga atau tatanan yang meliputi struktur sosial.

Para niniak mamak juga telah berupaya dalam menertibkan organ tunggal di Nagari Kasang. Namun upaya tersebut tidak berjalan dengan seharusnya. Hal tersebut dapat dilihat dengan masih maraknya organ tunggal pada acara perhelatan yang diadakan oleh masyarakat Nagari Kasang. Ini menyebabkan para tokoh adat berada pada titik jenuh sehingga membiarkan masyarakat Nagari Kasang untuk mengadakan hiburan tersebut sepanjang tidak terjadinya hal yang dapat merugikan orang banyak. Padahal sebagai tokoh masyarakat yang berwenang dan berpengaruh dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai adat salingka nagari, seyogyanya pemuka adat bekerja lebih dan kontiniu serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan harapan masyarakat dapat mematuhi norma adat dan norma kesopanan serta terhindar dari penyimpangan sosial. Maka dalam hal ini sangat penting adanya kontrol sosial dari pemuka adat.

Karel J. Veeger (dalam Setiadi 2011) mengatakan pengendalian sosial (kontrol sosial) merupakan suatu titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan berbagai metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan keinginan kelompok atau masyarakat yang dijalankan secara efektif. Perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban kegiatan organ tunggal di daerah ini sangat sulit dilakukan. Kesulitan tersebut muncul karena tidak adanya sinergi antara pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam upaya penertiban tersebut. Oleh karena itu penampilan organ tunggal saat pesta pernikahan masih terus terlaksana di tengah masyarakat. Dengan demikian, diperlukan sinergi dalam menyelesaikan masalah ini yakni antara elit agama, pemerintah dan adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Alam Andi. 2016. Hubungan Kewenangan Kementerian dalam Sistem Presidensial. [skripsi]. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Iswanto, Febri. 2018. Pengaruh Pertunjukkan Orgen Tunggal Terhadap Masyarakat dan Pemuda Kampung Air Panjang Jorong Kuamang Kenagarian Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *E-Jurnal Sendratasik Vol 7 No. 1 ISSN 2302 – 3201*
- Konija, Laras Putri. 2020. Orgen Tunggal di Nagari Kasang Pabupaten Padang Pariaman (Studi terhadap Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban OrgenTunggal). *Journal of Civic Education Vol 1 No. 3 ISSN 2622-237X*
- Fitra, Fadlil Heldi. 2017. *Efektifitas Berlakunya Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penertiban Orgen Tunggal di Nagari Pauah Kamba*. [skripsi]. Padang : Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
- Geny, Leo Putri. 2019. *Dinamika Komunikasi Antara Kelompok Adat dan Kelompok Pemuda (Studi Kasus Dalam Mengatasi Dampak Negatif Pementasan Orgen Tunggal di Kelurahan Pasir Kota Pariaman)*. [skripsi]. Padang : Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
- M, Elly Setiadi. 2011. Pengantar Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penertiban Orgen Tunggal